

Jurnal

ISSN 3025-5759

IDENTITAS

Kewarganegaraan, Administrasi Kependudukan & Penghapusan Diskriminasi

Volume 04 Nomor 01, Maret 2024

Managing Ambiguity: Religious Intolerance and Policy in Indonesia

Alamsyah M Djafar

Hidup dalam Kesenjangan: Paradox Migran Baru Asal Tiongkok (*Xinyimin*) dengan Masyarakat di Indonesia

Paulus Rudolf Yuniarto

From Conflictual to Peaceful Coexistence? Reconceptualizing The Relationship between Islam and The West

Muhammad Khoirul Muqtafa

Agama dan Kewarganegaraan: Minoritas Muslim dalam Masyarakat Hindu Bali

Eddy Setiawan

Menggugat Prinsip *Non-Interference* ASEAN: Dari Idealisme ke Pragmatisme Politik?

Husnul Atiyah

Resensi Buku: Politik Hukum dan Pembangunan Nasional Indonesia

Sukman

Jurnal IDENTITAS

ISSN 3025-5759

Kewarganegaraan, Administrasi Kependudukan & Penghapusan Diskriminasi

Volume 04 Nomor 01, Maret 2024

Tim Penyunting:

Dr. Rofiqul Umam Ahmad, SH., MH.

Saifullah Ma'shum, M.Si.

Sukman, SH., MH.

Eddy Setiawan, M.Si.

Adi Kurniawan, M.Si.

Mitra Bestari:

Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrullah, SH., MH

Direktorat Jenderal

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hamid Awaluddin, Ph.D

Universitas Hasanuddin, Makassar

Muhammad Khoirul Muqtafa, Ph.D

Badan Riset dan Inovasi Nasional

Rikard Bagun, Ph.D

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Dr. Ahmad Ahsin Tohari, SH., MH

Universitas Pembangunan Nasional, Jakarta

Pemimpin Redaksi

Eddy Setiawan

Desain dan Tata Letak

Riska El Haris

Distribusi & Tata Usaha

Waji Haris Setiawan

Penerbit

Institut Kewarganegaraan Indonesia

Alamat: Wisma 46 Kota BNI Lt. 14

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1,

Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Indonesia

Telp. 021-2510670,

Fax. 021-5702755

www.yayasan-iki.or.id

Jurnal IDENTITAS

Jurnal IDENTITAS adalah jurnal yang fokus pada isu-isu kewarganegaraan, administrasi kependudukan, dan penghapusan diskriminasi serta masalah-masalah kebangsaan, demokrasi dan hukum. Jurnal IDENTITAS ingin memfasilitasi dan mendorong berkembangnya berbagai pemikiran ilmiah mengenai isu-isu tersebut sekaligus mempublikasikan kajian dan penelitian mengenai hal tersebut. Jurnal IDENTITAS mengundang para pakar, akademisi, peneliti, pemerhati, dan aktivis di bidang kewarganegaraan, administrasi kependudukan, dan penghapusan diskriminasi serta masalah-masalah kebangsaan, demokrasi dan hukum untuk menulis di jurnal ini. Jurnal IDENTITAS terbit dua kali dalam setahun.

Yayasan Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI)

IKI adalah sebuah lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pengkajian, penelitian, penyebaran informasi, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, serta advokasi di bidang kewarganegaraan, administrasi kependudukan dan penghapusan diskriminasi. Yayasan IKI didirikan pada 11 Agustus 2006, tepat 10 hari setelah disahkannya UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Yayasan IKI didirikan oleh sejumlah tokoh yang memiliki perhatian dan komitmen terhadap isu-isu kewarganegaraan, administrasi kependudukan, dan upaya penghapusan diskriminasi. Yayasan IKI berkomitmen terlibat aktif dalam mendukung penyelesaian masalah-masalah kewarganegaraan, administrasi kependudukan, dan diskriminasi yang masih dialami oleh sebagian warga masyarakat dan kelompok masyarakat tertentu.

ISSN 3025-5759

Jurnal IDENTITAS

Kewarganegaraan, Administrasi Kependudukan & Penghapusan Diskriminasi
Volume 04 Nomor 01, Maret 2024

Daftar Isi

- Pengantar Redaksi i

- *Managing Ambiguity: Religious Intolerance and Policy in Indonesia*
Alamsyah M Djafar 1

- Hidup dalam Kesenjangan: Paradox Migran Baru Asal Tiongkok
(*Xinyimin*) dengan Masyarakat di Indonesia
Paulus Rudolf Yuniarto 34

- *From Conflictual to Peaceful Coexistence?*
Reconceptualizing The Relationship between Islam and The West
Muhammad Khoirul Muqtafa 60

- Agama dan Kewarganegaraan:
Minoritas Muslim dalam Masyarakat Hindu Bali
Eddy Setiawan 80

- Menggugat Prinsip *Non-Interference* ASEAN:
Dari Idealisme ke Pragmatisme Politik?
Husnul Atiyah 106

- Resensi Buku: Politik Hukum dan Pembangunan Nasional Indonesia
Sukman 127

- Panduan Penulisan Naskah 132

- Tentang Penulis 135

Redaksi menerima tulisan ilmiah tentang isu-isu kewarganegaraan,
administrasi kependudukan dan penghapusan diskriminasi ras dan
etnis serta tulisan-tulisan lain tentang hukum, demokrasi dan HAM



Hidup dalam Kesenjangan: Paradox Migran Baru Asal Tiongkok (*Xinyimin*) dengan Masyarakat di Indonesia

Paulus Rudolf Yuniarto

Pusat Riset Kewilayahan - Badan Riset dan Inovasi Nasional
rudolfyuniarto@gmail.com

ABSTRAK

Para migran baru dari China (*Xinyimin*) di Indonesia umumnya datang untuk pencarian pekerjaan, peluang bisnis, peningkatan pendidikan, dan pernikahan. Migrasi mereka ini membawa pertukaran sosial-budaya antarmanusia dan memberikan bab menarik tentang interaksi antara orang Indonesia dan *Xinyimin*. Sebagaimana diamati, arus masuk migran baru dari China terus-menerus sejak booming ekonomi negara mereka telah mengakibatkan kesenjangan yang semakin besar dengan orang Indonesia. Lantas dipandang sebagai ancaman terhadap kehidupan warga lokal dan tatanan sosial yang ada. Ketegangan tuan rumah-pendatang tersebut telah memicu politik lokal-nasional. Ketegangan interaksi terjadi di tempat antara pekerja asal China yang datang dengan warga lokal telah menarik perhatian publik. Misalnya, pekerja lokal membenci gaji pekerja China yang lebih tinggi dan perlu berjuang terus-menerus hanya untuk mendapatkan gaji yang baik, terlepas dari kebangsaannya. Keberadaan *xinyimin* di Indonesia dianggap sebagai orang asing sekaligus pesaing dan menjadi masalah karena telah melakukan eksploitasi sumber daya lokal. Kondisi ini menjadi salah satu kendala bagi interaksi dan akulturasi *xinyimin* di Indonesia selanjutnya.

Kata kunci: xinyimin, interaksi, nasionalisme, konflik

¹ Naskah ini pernah dipresentasikan pada International Workshop on New Chinese Capitals and Migrations in Southeast Asia in the Post-Pandemic Era, 23 Juni 2023, Department of Public and International Affairs at City University of Hong Kong dan the Institute of China Studies at the University of Malaya.

ABSTRACT

New migrants from China (Xinyimin) in Indonesia generally migrate for employment, business opportunities, educational advancement, and marriage. Their presence fosters socio-cultural exchange and offers a significant perspective on the interaction between Indonesians and Xinyimin. However, the ongoing influx of migrants from China since the country's economic boom has led to an expanding gap between them and the local population. This disparity is perceived as a threat to the livelihoods of Indonesians and the established social order. Consequently, the host-immigrant tensions have sparked local-national political debates. The friction between Chinese workers and local Indonesians has garnered public attention, with local workers expressing resentment toward the higher wages of Chinese migrants while struggling to secure comparable earnings, regardless of nationality. The presence of Xinyimin in Indonesia is viewed not only as a foreign element but also as a competitive force, raising concerns due to their perceived exploitation of local resources. This situation presents a significant obstacle to the interaction and acculturation of Xinyimin in Indonesia.

Keywords: xinyimin, interactions, nationalism, conflict

PENDAHULUAN

Dibandingkan tahun 1990, jumlah migran Tiongkok yang tinggal di luar negeri meningkat lebih dari dua kali lipat dari 4,2 juta menjadi 9,5 juta di tahun 2015 (Muttarak, 2017). Presentase peningkatan migrasi Tiongkok terbesar dapat diamati di Asia Barat (524%), Afrika Timur (297%) dan Afrika Selatan (126%). Meningkatnya jumlah migran Tiongkok di Asia dan Afrika sejalan dengan pertumbuhan perdagangan dan investasi Tiongkok di negara-negara di kedua benua ini (Mohan, *et al*, 2014). Perlu diperhatikan bahwa peningkatan

jumlah migran Tiongkok tidak terbatas di koridor sabuk jalan tetapi terjadi juga di belahan dunia lain seperti Eropa Selatan (781%), Australia dan Selandia Baru (420%) dan Amerika Utara (198%) (Departemen Ekonomi dan Sosial PBB, 2015). Secara umum warga yang bermigrasi ke negara-negara berkembang di Asia dan Afrika terdiri dari para produsen, pengusaha, pegawai negeri Tiongkok, dan pekerja migran; sementara yang terkait dengan proyek investasi Tiongkok yang didanai publik terdiri dari pengusaha kecil, migran transit,

hingga para pekerja pertanian (Mohan, *et al*, 2014).²

Ciri khas migran (pendatang) baru Tiongkok ini ditandai oleh perbedaan karakter dengan pendatang pada era sebelumnya. Migran Tiongkok lama pada umumnya memiliki beberapa karakteristik, antara lain: melarikan diri dari kesulitan di kampung halaman mereka; kebanyakan dari mereka adalah laki-laki; kurang berpendidikan; kemampuan berintegrasi budaya dengan warga setempat; dan membentuk asosiasi berdasarkan kampung halaman mereka. Namun tidak demikian dengan para migran baru yang berbeda karakter, antara lain: mencari peluang ekonomi dengan

orientasi pekerjaan formal yang lebih baik; pekerja perempuan maupun laki-laki sama-sama banyaknya; berpendidikan (walau tidak semuanya); terikat secara ekonomi dan emosional dengan negara asal; membentuk asosiasi berdasarkan basis pekerjaan atau lokasi; dan memiliki kombinasi budaya asal dan daerah tujuan (Siriphon, 2015).³

Migrasi orang Tiongkok baru ini menghadapi tantangan kehadiran mereka dan pada soal hubungan antar manusia jangka panjang (Kanak, 2016). Lebih khusus lagi, persoalan dari sektor migrasi manusia tidak hanya menyangkut berapa jumlah kedatangan orang asing di suatu negara namun juga ini terkait

² Migrasi warga Tiongkok semakin berkembang seiring dijalankan program Inisiatif Sabuk Jalan tahun 2013. Inisiatif Sabuk Jalan selain untuk investasi dalam mengatasi kebutuhan besar infrastruktur Tiongkok dan negara mitra—sektor transportasi dan pengelolaan sumber daya alam—juga berimplikasi menciptakan ratusan pekerjaan, pergerakan pariwisata, migrasi manusia, maupun pertukaran sosial-budaya ke seluruh wilayah negara mitra. Inisiatif Sabuk Jalan secara praktik berupaya mensinergikan kegiatan pengembangan jaringan infrastruktur dengan kebutuhan lain yang terkait interaksi antara manusia yang berbeda-beda dan berkelanjutan.

³ Migrasi ke negara berkembang biasanya dianggap sebagai turis atau pendatang, yang menyiratkan masa tinggal yang hanya singkat saja di negara tuan rumah. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Douglas Massey (1998) menyebutkan orang yang pindah ke negara kurang berkembang sebagai “reverse migrants,” “privileged migrants,” atau “lifestyle migrants,” yang semuanya menyiratkan bahwa orang yang pindah ke negara berkembang tidak biasa (kurang umum) dalam arah bermigrasi yang biasanya menuju daerah lebih maju, sumber daya apa yang akan mereka peroleh, apakah peningkatan status sosial atau gaya hidup mereka, menjadi pertanyaan dari model migrasi ini. Misalnya studi tentang orang Eropa di Afrika dan Asia selama periode kolonial dan sesudahnya, atau ekspatriat Eropa di Asia saat ini, menunjukkan bahwa jenis migran ini tidak terlalu banyak yang berpindah dari negara asalnya. Kebanyakan migran tersebut berasal dari kelompok kelas menengah (atau di bawahnya), dengan modal ekonomi, sosial, dan budaya yang terbatas. Setelah pindah ke negara tuan rumah, para migran tersebut diperlakukan sebagai kelas atas (atau elit) dalam struktur hierarki politik dan ekonomi. Hal ini karena tempat asal mereka tingkat pembangunan yang lebih tinggi dari negara tuan rumah (dalam hal modernisasi/industrialisasi) atau kemajuan negara asal di negara tujuan. Karena kesenjangan perkembangan antar negara, bahkan modal ekonomi, sosial, dan budaya para migran yang walaupun terbatas mendapat penilaian tinggi di negara tuan rumah. Karena valuasi yang tinggi ini, tidak sulit bagi migran tersebut untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, menempati status sosial ekonomi yang lebih tinggi, dan menjalani kehidupan yang lebih nyaman daripada yang dapat mereka capai di negara asal mereka. Singkatnya, para migran ini memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengejar impian mereka dengan pindah ke negara yang kurang berkembang.

dengan bagaimana proses interaksi berlangsung, pandangan masyarakat lokal terhadap pendatang, serta unsur perbedaan nilai sosial dan budaya antar manusia di dalamnya. Hal ini dikarenakan, migrasi manusia menciptakan eksposur budaya dan interaksi antar individu/kelompok yang bisa positif maupun negatif. Selain itu, persoalan pendatang baru Tiongkok di Indonesia saat ini masih menjadi salah satu isu hangat dalam politik. Kehadiran investasi dari Tiongkok dan pekerjaannya seringkali disebut sebagai ‘ancaman’ bagi perekonomian masyarakat lokal Indonesia.

Berdasarkan pengantar diatas, tulisan ini mencoba menjawab pertanyaan tentang bagaimanakah dinamika interaksi sosial dan budaya antara masyarakat lokal Indonesia dengan migran ‘baru’ Tiongkok di Indonesia? Pertanyaan ini untuk mengenali lebih dalam proses interaksi sehari-hari antara kedua kelompok masyarakat membentuk pandangan masyarakat luas terhadap migran asal Tiongkok. Kemudian dalam konteks nasional konteks nasional, bagaimana narasi “ancaman” terhadap perekonomian lokal dan pengaruhnya terhadap identitas dan sentimen anti-asing di Indonesia? Pertanyaan ini untuk memperlihatkan bagaimana kualitas kedekatan kedua kelompok dalam perbedaan persepsi, sistem dan nilai budaya serta pengungkapan/ekspresi kehidupan masing-masing orang yang berbeda.

Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan pada tahun 2021, dengan teknik diskusi terpumpun bersama dengan peneliti dan pejabat pemerintah serta didukung oleh pengumpulan sumber sekunder berupa artikel akademis, dokumen kebijakan dan laporan penelitian. Sesuai dengan tujuan penulisan, analisis dilakukan pada level masyarakat mengenai gambaran narasi ancaman eksistensi migran pendatang asal Tiongkok dikonstruksi dan disebarluaskan, serta dampaknya terhadap identitas lokal dan sentimen anti-asing di Indonesia.

Migrasi, Imitasi, dan Akselerasi *Xinyimin*

Secara definitif ‘migran baru’ Tiongkok pada artikel ini mengacu pada Orang Tiongkok Daratan/Kepulauan yang bermigrasi ke luar negeri setelah era reformasi dan keterbukaan 1978 dan seterusnya. Mereka bertempat tinggal, baik secara permanen maupun tidak permanen, di negara tujuan dengan atau tanpa melepas kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) (Nukitranngsan, 2019). Suryadinata (2020) menggambarkan migran baru dari daratan Tiongkok (termasuk Taiwan, Hong Kong, dan Macau) yaitu mereka yang tinggal di negara lain selama lebih dari satu tahun. Mereka berpindah tempat tinggal, baik di dalam suatu negara atau di seberang perbatasan interna-

sional, karena berbagai alasan. Dalam penyebutan migrasi orang Tiongkok ini selanjutnya seringkali disebut dengan istilah *xinyimin* (新移民 yang artinya migran/pendatang baru asal Tiongkok). Dalam hal istilah ada pula yang menyebut *xinyimin* sebagai *Huaqiao* tipe baru (Tionghoa perantauan) merujuk pada orang Tiongkok Daratan yang juga memegang paspor Tiongkok yang telah memulai bisnis mereka di luar negeri dalam beberapa tahun terakhir.⁴

Pada dasarnya migrasi orang Tiongkok daratan sebelum 1978, khususnya ke Indonesia, memiliki cerita dan faktor pendorong yang sangat beragam. Menurut Liem Tjoe Koen (1992), mereka datang sebagai pedagang, pelaut, dan penjelajah yang tertarik dengan kekayaan rempah-rempah dan hasil bumi Nusantara. Interaksi antara masyarakat pendatang Tiongkok daratan dengan pribumi terjalin erat, membentuk peradaban yang kaya dan beragam, antara lain, terlibat dalam perdagangan, perbankan, dan industri kecil. Secara umum faktor pendorong migrasi ini antara lain: peluang ekonomi yang

lebih baik di Nusantara menjadi daya tarik utama bagi pendatang Tionghoa; adanya konflik internal di Tiongkok, seperti perang saudara atau pemberontakan, mendorong banyak orang untuk mencari suaka di luar negeri; dan untuk mencari pasangan hidup atau bergabung dengan keluarga yang sudah ada di sana (Liem Tjoe Koen, 1992).

Gelombang migran baru Tiongkok paska 1978 ke Indonesia secara signifikan berkembang pada masa pemerintahan Hu Jintao (2003-2013) bersamaan dengan diluncurkan paket kebijakan “*go out strategy*” dan “*strategic partnership Indonesia-China*”. Dengan peluncuran program sabuk jalan dan maritim Tiongkok oleh Xi Jinping pada tahun 2013, jumlah migran asal Tiongkok ke Indonesia meningkat seiring dengan banyaknya perusahaan baik negara dan swasta asal Tiongkok yang didirikan di Indonesia (Suryadinata, 2020).⁵ Sebagian besar investasi asing langsung dari Tiongkok daratan ke Indonesia baru berkembang sekitar tahun 2000-an. Investasi ini menciptakan kegiatan ekonomi bisnis yang beragam, di antaranya seperti kegiatan

⁴ Istilah pekerja migran dan tenaga kerja asing (TKA) Tiongkok digunakan secara bersamaan dan bergantian dengan maksud dan definisi yang sama.

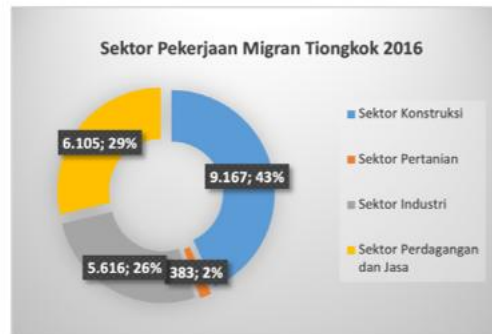
⁵ Jauh sebelum berkembang hubungan dengan Tiongkok daratan, hubungan kerjasama dengan Indonesia sudah diawali dan dikembangkan oleh para pebisnis dari Taiwan yang datang ke Indonesia. Seperti dicatat oleh Ping Lin (2016) sebagian besar investasi dari daerah Taiwan di Indonesia terjadi pada industri padat karya (seperti tekstil, furnitur kayu, dan produksi kertas) sudah berlangsung pada era 1980-an di kota-kota di Jawa, seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Perusahaan Taiwan memindahkan lokasi produksi ke Asia Tenggara (termasuk Indonesia) karena kenaikan biaya produksi di Taiwan. Tren relokasi perusahaan ini telah menyebabkan orang Taiwan pindah ke Asia Tenggara juga, baik sebagai pengusaha, manajer perusahaan, atau untuk menemani anggota keluarga.

proyek infrastruktur (jalan, jembatan, dan kereta api), pengolahan bahan mentah (nikel, gas alam, dan listrik), pendirian pabrik, pengembangan properti, dan e-commerce di berbagai wilayah (seperti Sulawesi, Jakarta, dan Banten).

Para pekerja migran bekerja antara lain sebagai: pengusaha jasa; pekerja garmen terampil; dan pekerja kantoran di sektor konstruksi, teknik, keuangan, akuntansi, hukum usaha, media dan jurnalisme. Tidak hanya bekerja di proyek yang dijalankan oleh perusahaan, mereka juga menjadi karyawan, atau belajar di salah satu universitas. Sebagian lain pendatang baru Tiongkok di Indonesia juga terlibat dalam kegiatan usaha kecil-menengah sektor pariwisata, bekerja di sektor pengajaran, bekerja untuk organisasi pemerintah atau perusahaan swasta. Sebagai pengusaha swasta, mereka berkonsentrasi pada produksi dan ekspor tekstil, gadget, furnitur dan kerajinan tangan, atau menjalankan tempat-tempat terkait pariwisata seperti wisma, bar atau restoran. Di sektor sosial, pengajaran bahasa Mandarin adalah yang paling menonjol, setelah bahasa Inggris dan Jepang. Cabang Pusat Bahasa Mandarin (PBM) yang ada di Indonesia mempekerjakan beberapa warga negara asing.

Menurut perkiraan pengamat *xinyimin*, terdapat lebih dari 1.000 perusahaan Tiongkok di Indonesia; 260 di antaranya tergabung dalam *China Cham-*

ber of Commerce in Indonesia (CCCI). Pekerja Tiongkok di Indonesia menyumbang 30% - atau sekitar 32.000 orang pekerja asing pada tahun 2018. Angka ini meningkat sekitar 8.000 pekerja dari tahun sebelumnya, menjadikan mereka sebagai kelompok pekerja asing terbesar di Indonesia. Mereka menduduki posisi profesional tingkat menengah yang tidak diisi oleh tenaga kerja lokal orang Indonesia. Tenaga kerja lokal mengisi pekerjaan di antaranya yang membutuhkan keahlian atau keterampilan rendah (der Eng, 2018). Berikut ini adalah gambaran sektor pekerjaan migran asal Tiongkok pada tahun 2016.



Sumber: Kemenaker, 2019

Faktor lain pendorong kedatangan migran Tiongkok ke Indonesia karena adanya eksplorasi dan pengembangan sumber daya alam (nikel, batubara, dan lainnya) serta jumlah penduduk yang banyak (238.518.000 jiwa tahun 2015). Banyak perusahaan Tiongkok melihat Indonesia sebagai pasar produksi yang menjanjikan. Faktor kedekatan hubungan antara

Indonesia dan Tiongkok juga menjadi pertimbangan bagi perusahaan asal Tiongkok untuk membuka usaha dan kantor perwakilannya di Indonesia. Dari kerjasama bilateral ini, nilai investasi Tiongkok di Indonesia yang pada kuartal ketiga tahun 2016 mencapai 1,6 miliar dolar dan engara ini menempati urutan ketiga investor terbesar di Indonesia.

Menurut survei online yang dilakukan oleh blog WeChat Big Brother Du terhadap limapuluhan perusahaan Tiongkok yang ada di Jakarta tahun 2018, memperlihatkan sebagian perusahaan masih relatif baru didirikan dan sebagian besar karyawannya juga masih muda berusia di bawah 35 tahun. Karena sebagian besar migran Tiongkok masih muda, lama tempat tinggal di Indonesia lebih pendek daripada migran sebelumnya. Survei yang sama mengungkapkan bahwa tidak semua migran Tiongkok adalah pemegang KITAS (kartu izin tinggal atau kerja). Sementara yang lain masuk ke Indonesia dengan visa turis selama tiga puluh hari yang tidak dapat diperpanjang, visa pendaratan tiga puluh hari yang dapat diperpanjang, atau visa bisnis yang dapat diperpanjang enam puluh hari. Sebagian besar masuk ke Indonesia dengan berbagai jenis visa, tinggal di Indonesia selama beberapa bulan, kemudian meninggalkan Indonesia selama beberapa hari, minggu, atau bulan sebelum masuk kembali ke Indonesia. Jenis tempat tinggal “*on-and-off*”

ini sangat umum di antara migran Tiongkok. Temuan ini menegaskan bahwa migran asal Tiongkok mempunyai pola masuk, keluar, dan masuk kembali ke Indonesia. Jumlah migran Tiongkok secara riil di Indonesia mungkin jauh lebih tinggi dari jumlah migran yang terdaftar (Lin, 2020).

Secara umum, pendidikan migran Tiongkok telah menyelesaikan pendidikan wajib dua belas tahun (atau lebih). Ada juga yang berasal dari perguruan tinggi (tiga sampai lima tahun) atau jenjang magister universitas. Beberapa peserta dalam grup *WeChat Indonesian Perspectives* adalah orang-orang yang pernah mengambil jurusan Bahasa Indonesia di Tiongkok atau pernah belajar di Indonesia sebagai siswa penuh waktu sebelum memulai karir mereka. Bagi peserta di blog lain atau grup We-Chat, terlihat bahwa sebagian memiliki akses ke media massa lokal (TV atau surat kabar berbahasa Indonesia). Tingkat kemampuan bahasa dalam Bahasa Indonesia ini jarang dimiliki di antara migran dari negara lain (Lin, 2020).

Sebagian besar migran baru Tiongkok di Indonesia berasal dari kota-kota di provinsi bagian dalam (misalnya, Henan atau Hunan) atau kabupaten yang kurang terkenal di provinsi pesisir (misalnya Fuqing, bukan Fuzhou, di provinsi Fujian, atau Weifang, bukan Jinan, di provinsi Shandong). Sedikit yang berasal dari kota besar (seper-

ti, Beijing, Shanghai, dan Guangzhou) atau ibu kota provinsi pesisir. Mereka menggambarkan migrasi ke Indonesia dalam istilah *fanshen le* (翻身了), untuk membebaskan diri dari kemiskinan/kesukaran hidup). Meskipun Tiongkok secara ekonomi lebih baik dari Indonesia, namun peluang ekonomi tidak mudah didapatkan (Lin, 2020). Oleh karena itu, migrasi orang Tiongkok ke luar negeri untuk menangkap peluang karir dan perbaikan hidup yang mereka harapkan bisa diperoleh di Indonesia yang mana di Tiongkok sendiri kemungkinan tidak bisa meningkatkan taraf hidup lebih tinggi. Sebagian besar mereka membentuk kelompok “hubungan kerja” mengikuti proyek atau perusahaan bisnis di mana mereka bekerja di Indonesia.

Dibawah skema kemitraan strategis Indonesia-Tiongkok, hubungan antara Indonesia dan Tiongkok berkembang dalam bidang pendidikan. Hal ini memunculkan migrasi pelajar Tiongkok dalam beberapa dekade terakhir ke Indonesia untuk mendalami kajian bahasa, budaya, pengajaran, dan bidang lainnya. Sejak tahun 2010, Yayasan Zhongguo Gangwan (中国 港湾) Hong Kong dan Bay Area Enterprise melakukan kerjasama dan menawarkan 15-20 beasiswa tahunan kepada President University. President University adalah kampus yang memi-

liki hubungan erat dengan universitas dan perusahaan asal Tiongkok.⁶ Hasil lulusan dari President University ini, kurang lebih 1.000 di antaranya, menjadi tulang punggung karyawan perusahaan bisnis Tiongkok di Indonesia. Kenyataan ini terus berkembang bukan hanya menjadi karyawan tetapi juga mendirikan perusahaan baru. Mahasiswa Tiongkok lulusan President University ini cukup fasih berbahasa Indonesia dan seringkali menjadi penerjemah bahasa Mandarin (Suryadinata, 2020).

Paradox *Xinyimin*

Perbedaan ‘cara’ bekerja

Cara kerja orang Tiongkok berbeda dengan orang-orang di Indonesia, dan seringkali ini menciptakan manajemen kerja yang tidak harmonis. Sebuah contoh kasus di tahun 2017, manajer di satu perusahaan Tiongkok (tidak disebutkan namanya) mengancam akan memecat pekerja lokal dan bahkan mengintimidasi para pemimpin serikat pekerja yang menuntut kondisi kerja yang lebih baik. Hal ini menyebabkan demonstrasi besar-besaran di depan Kedutaan Besar China oleh serikat pekerja seperti SEBU-MI-NANBU (Serikat Buruh Bumi Manusia-Nanbu) dan KASBI (Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia, salah satu serikat pekerja terbesar di Indonesia).

⁶ Pada tahun 2001 seorang bankir Indonesia keturunan Tiongkok, Li Moming dari Pan-Indonesia Bank, mendirikan President University (Universitas Presiden) di kawasan Cikarang-Jakarta. Li mempunyai program menawarkan 100 beasiswa setiap tahun kepada siswa Tiongkok Daratan untuk mendaftar di universitas itu.

Masalah ini mendominasi berita utama di media berbahasa Indonesia di Indonesia, yang menyebabkan protes terhadap perusahaan tersebut. Menyadari kekuatan serikat pekerja Indonesia, perusahaan Tiongkok akhirnya melunakkan pendiriannya dan setuju untuk memenuhi semua tuntutan yang dibuat oleh karyawan, termasuk menawarkan posisi tetap, kesejahteraan medis, pelatihan staf dan peningkatan keselamatan (Gong, 2018).

Investasi Tiongkok di Indonesia menunjukkan adanya kelemahan karyawan perusahaan Tiongkok dalam memahami kebiasaan kerja buruh lokal, begitu juga sebaliknya. Ada perbedaan dalam memahami apa yang dapat disebut "*working understanding*" atau tata perilaku individu maupun organisasi dalam bekerja. Misalnya, perusahaan Tiongkok yang berinvestasi di Indonesia dianggap kurang memiliki pengetahuan tentang cara kerja serikat pekerja. Di Indonesia, serikat pekerja merupakan perwakilan suara karyawan. Perusahaan Tiongkok seringkali tidak menanggapi atau memenuhi tuntutan karyawan/buruh. Lebih buruk lagi, beberapa perusahaan Tiongkok justru malah melewati aturan perusahaan (dan bahkan hukum) yang tertera dalam kontrak atau klaim asuransi. Pola karyawan perusahaan Tiongkok seperti itu karena mereka terbiasa dengan pendekatan 'struktural' (pola kerja di dalam neg-

eri mereka) yang mengandalkan berbagai koneksi dan sumber daya untuk menyelesaikan berbagai masalah di perusahaan. Di Tiongkok sendiri, karena persaingan yang ketat untuk mendapatkan pekerjaan dan perlindungan hukum yang tidak memadai, para karyawan/buruh pada umumnya menerima saja aturan (tuntutan) dari pemilik perusahaan atau majikan. Beberapa manajemen perusahaan Tiongkok secara keliru percaya bahwa hal ini juga terjadi di luar negeri.

Di ruang kerja, standar "cara kerja" yang berbeda terkadang membuat pekerja Tiongkok frustrasi. Misalnya, ketika seorang manajer pengadaan menginstruksikan stafnya untuk membeli suatu barang. Manajer sudah mempunyai jadwal pembelian, termasuk apa yang akan dibeli dan kapan departemennya harus membeli barangnya, namun terkadang stafnya dari Indonesia sering tidak langsung melakukan instruksinya; stafnya menganggap pembelian bisa dilakukan nanti karena stok barang yang dibutuhkan masih cukup (Chang, 2011). Dalam hal waktu kerja ditetapkan oleh perusahaan untuk masuk bekerja pada pukul 08.00 WIB, namun tenaga kerja lokal kebanyakan yang baru tiba di lapangan yaitu pukul 09.00 WIB. Didalam waktu bekerja, mereka mengambil waktu dengan alasan untuk merokok, atau meminum kopi, sehingga waktu kerja mereka lebih banyak untuk beristirahat.

Berbeda dengan pekerja Tiongkok, jika mereka ditetapkan masuk bekerja pada pukul 07.00 WIB, maka mereka pada waktu yang telah ditetapkan itu telah hadir di lapangan. Selain tepat waktu, didalam bekerja, mereka juga sangat memanfaatkan waktu tersebut dengan baik. Jika tiba waktu istirahat, mereka juga mempergunakan waktu itu dengan sempurna. Pekerja Tiongkok mencontohkan cara bekerja, yakni tidak banyak berbicara, dan fokus dalam bekerja, sehingga menghasilkan produktivitas kerja yang cepat.

Dari situasi yang diuraikan diatas, terlihat bahwa masalah dalam kegiatan perusahaan Tiongkok di Indonesia tidak selalu karena masalah kendala bahasa melainkan perbedaan memaknai cara atau model bekerja masing-masing. Budaya dari negeri Tiongkok adalah budaya monokromik, jadi pekerja Tiongkok terbiasa melakukan segala sesuatu dalam waktu yang direncanakan dengan ketat dan cepat. Dengan kata lain mereka mengatur segalanya sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Sedangkan pekerja Indonesia memiliki budaya polikromik dimana kebalikan dari monokromik, sehingga waktu menjadi lebih fleksibel (Hall & Hall, 1990). Dari segi monokromik dan polikromik terlihat bahwa cara kerja orang Tiongkok dan orang Indonesia berbeda. Perbedaan cara/model kerja ini sebenarnya bukan masalah besar bagi perusahaan, karena Tiongkok dan

Indonesia sama-sama negara Asia. Namun, karena hal-hal kecil bisa menjadi masalah besar, cara seseorang mengerjakan suatu tugas bisa menjadi masalah bagi orang lain dan kinerja perusahaan. Pada akhirnya kedua belah pihak beranggapan lebih '*civilised*' daripada yang lain berdasar pada kebiasaan budaya masing-masing.

Setiap individu dan perusahaan dapat mengalami masalah komunikasi, apalagi individu dan perusahaan yang anggotanya memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Dalam perusahaan dan kehidupan sosial, terlihat bahwa setiap orang membawa budayanya sendiri ke dalam perusahaan, dan tanpa disadari seringkali memiliki efek yang merusak bagi kelangsungan usaha dan hubungan sosial. Untuk menyelaraskan perbedaan ini, setiap individu dalam perusahaan dan lingkungan sosialnya harus memiliki tingkat kepercayaan, empati budaya, kesadaran budaya dan kesadaran yang baik. Budaya korporat dan sosial juga harus dibentuk dan disesuaikan dengan kebutuhan individu dan organisasi, sehingga ketika harmoni tercapai akan membawa efek positif bagi perusahaan dan kehidupan sosial di semua aspek kegiatan migran baru Tiongkok.

Pelanggaran administrasi kerja

Beredar rumor di media sosial Indonesia bahwa ada sekitar 10 hingga

20 juta pekerja Tiongkok di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan membantah angka tersebut. Ia menjelaskan bahwa jumlah tenaga kerja Tiongkok di Indonesia kebanyakan bekerja di proyek investasi milik perusahaan Tiongkok. Motivasi politik dicurigai di balik desas-desus yang menimbulkan ketakutan bahwa pekerja asal Tiongkok akan mengambil alih pekerjaan orang lokal. Disamping soal ambil alih pekerjaan oleh tenaga kerja Tiongkok, ada persoalan lain yang juga penting, yaitu soal pelanggaran keimigrasian.⁷

Pelanggaran Keimigrasian Pekerja Asing di Indonesia		
Tahun 2017 : 7.877 Orang Asing		
No.	Negara	Jumlah
1.	China (Tiongkok)	1.837
2.	Afghanistan	655
3.	Bangladesh	389
4.	Vietnam	213
5.	Malaysia	245
6.	Somalia	198
7.	Iran	181
8.	Irak	183
9.	Philippina	182
10.	India	180

Sumber: Balitbang Hukum dan HAM, 2017.

Berdasarkan data Dirjen Imigrasi tahun 2017, Warga negara asal Tiongkok merupakan jumlah terbanyak yang dikenai Tindakan Administrasi Keimi-

grasian (TAK), diikuti dengan warga negara dari Afghanistan, Bangladesh, Malaysia, dan Vietnam. Warga negara asing yang terkena TAK tersebut diantaranya adalah WNA yang menyalahi izin tinggal, datang ke Indonesia dengan dokumen imigrasi yang bukan untuk bekerja tetapi melakukan kegiatan sebagai tenaga kerja (Balitbang Hukum dan HAM, 2017).

Pekerja asing dari Tiongkok datang ke Indonesia ada yang bekerja dengan status kerja tidak resmi. Mereka tidak memiliki dokumen pendukung dan bekerja tanpa izin dari pihak berwenang Indonesia seperti imigrasi dan kementerian. Pola pekerja Tiongkok di berbagai daerah tidak memiliki IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Asing). Pekerja Tiongkok masuk terlebih dahulu menggunakan visa turis untuk bekerja di Indonesia. Kegiatan ini juga diiringi dengan proses pengurusan IMTA di Kementerian terkait. Tentu, hal ini tidak sesuai

⁷ Menurut Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat Tenaga Kerja Asing (TKA) yang terjaring kasus pelanggaran keimigrasian mencapai 1.521 pekerja sepanjang 2018. Jumlah ini meningkat 290% dari tahun sebelumnya yang hanya 390 pekerja. Kasus pelanggaran TKA terbanyak karena bekerja di Indonesia tanpa memiliki Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA), yakni mencapai 1.237 pekerja dan merupakan yang terbanyak dibanding kasus lainnya. Kasus pelanggaran TKA terbesar kedua adalah penyalahgunaan jabatan yang melibatkan 104 pekerja. Atas tindakan pelanggaran TKA tersebut, sebanyak 1.511 pekerja telah diperintahkan keluar dari lokasi kerja dan 11 pekerja diberikan rekomendasi keimigrasian keluar dari Indonesia (Balitbang Hukum dan HAM, 2017).

dengan peraturan tenaga kerja yang berlaku, bahwa tenaga kerja yang bekerja di Indonesia harus memiliki IMTA sebelum bekerja yang diajukan oleh pihak sponsor. Setelah mendapatkan izin, tenaga kerja asing tersebut dapat bekerja di Indonesia. Pola pelanggaran pekerja asal Tiongkok di Indonesia ini juga akibat pemalsuan dokumen dengan mencantumkan jabatan tertentu di perusahaan tempat mereka bekerja, namun faktanya mereka bekerja sebagai pekerja kasar (Oktavia & Badarudin, 2017).

Selain itu, berdasarkan Peraturan Presiden No. 20/2018, Pasal 1, Bab 1, no. 2, disebutkan bahwa “Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memperhatikan kondisi pasar kerja dalam negeri” dan tenaga kerja asing dianggap sebagai tenaga pendamping. Tenaga Kerja Pendamping adalah tenaga kerja Indonesia yang ditunjuk dan dipersiapkan sebagai pendamping dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian”. Mayoritas pekerja Tiongkok yang masuk ke Indonesia tidak (seluruhnya) memiliki keterampilan dengan pengetahuan dan pendidikan sebagai tenaga kerja pendamping di Indonesia (Oktavia & Badarudin, 2017).

Pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan Tiongkok atau perekrut tenaga kerja bertentangan dengan aturan ketenagakerjaan Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 yang menyatakan, “Tenaga kerja asing harus memiliki pendidikan yang sesuai dengan jabatannya. untuk bekerja di Indonesia”. Pemerintah Tiongkok dalam proses pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, memiliki 2 lembaga penerah tenaga kerja, yaitu *Overseas Labor Cooperation Companies (OLCs)*⁸ dan *Overseas Employment Agencies (OEAs)*⁹. Namun di luar dua lembaga tersebut, ditemui adanya praktek pengiriman tenaga kerja oleh lembaga fiktif dan manipulatif yang mengirim tenaga kerja ke luar negeri. Beberapa agen tenaga kerja atau perantara tidak memiliki “Sertifikat Kualifikasi Operasional Republik Rakyat Tiongkok untuk Layanan Kerjasama Tenaga Kerja dengan Pihak Asing” yang dikeluarkan dan diberikan oleh pemerintah Tiongkok (Mei, 2010). Mereka merekrut banyak tenaga kerja dari kota kecil dan daerah perdesaan untuk disalurkan melalui agen-agen dan perantara yang tidak memiliki sertifikat kualifikasi dan bekerjasa sama dengan luar negeri

⁸ OLCs secara teknis menangani pengiriman tenaga kerja dalam skala besar dan sistematis. OLCs biasanya memiliki relasi triangular dengan pengusaha di luar negeri dan tenaga kerja Tiongkok. OLCs bertanggung jawab untuk manajemen tenaga kerja yang direkrut selama masa kontrak dan menyediakan dana kontingensi jika ada perselisihan tenaga kerja.

⁹ OEAs menyediakan layanan dasar dan informasi bagi pekerja yang prospektif, tetapi tidak bertanggungjawab untuk manajemen atau supervisi tenaga kerja begitu ia berada di luar negeri. Agensi ini disupervisi oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

maupun disalurkan melalui jalur individu. Mekanisme ini menjadi salah satu faktor yang memicu terjadinya pekerja ilegal dari Tiongkok ke negara lain termasuk Indonesia. Mereka ini umumnya bekerja di perusahaan diluar mekanisme kerjasama antar pemerintah yang berasal dari perusahaan swasta/individu.

Hal lain terkait maladministrasi pekerja asing adalah pengawasan terhadap TKA oleh pemerintah Indonesia dalam mencegah masuknya TKA ilegal, belum maksimal. Berdasarkan data Kemaker tahun 2017, pengawas TKA berjumlah 2.294 orang, terdiri dari pengawas umum, spesialis dan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil). Jumlah tersebut belum mampu menjangkau TKA sebesar 71.025 orang yang merupakan TKA legal, belum lagi TKA ilegal. Tenaga pengawas tersebut juga harus mengawasi sejumlah 216.547 perusahaan. Idealnya satu pengawas mengawasi 5 perusahaan. Di samping itu, dilihat dari distribusi jumlah pengawas menurut daerah kabupaten/kota, terdapat lebih dari 150 kabupaten/kota dari 514 kabupaten yang tidak mempunyai tenaga pengawas. Sementara itu, pada beberapa kabupaten/kota, jumlah tenaga pengawas tidak sesuai dengan jumlah TKA yang ada, seperti di Kabupaten Morowali, terdapat sekitar 2.000 orang TKA sementara jumlah tenaga pengawas hanya 1 (satu) orang. Sebagai dampak-

nya, banyak kasus pelanggaran akibat dari kurangnya pengawasan sekaligus lemahnya penegakan hukum. Oleh karena itu dapat dipahami TKA yang bekerja ilegal, khususnya asal Tiongkok, di sejumlah daerah Indonesia (misalnya Bogor Jawa Barat, Konawe-Sulewesi Tenggara, Gresik-Jawa Timur, Murung Raya-Kalimantan Tengah, dan daerah lainnya). Kenyataan ini mengindikasikan keberadaan TKA ilegal Tiongkok telah menyebar ke berbagai daerah di Indonesia (Asiati et. al., 2017).

Prasangka etnis dan eksklusif

Dalam konteks hubungan sosial (budaya), beberapa kendala utama yang menghalangi migran Tiongkok dapat beradaptasi atau berasimilasi di Indonesia adalah pendapat atau persepsi publik Indonesia tentang Tiongkok, antara lain: gambaran mengenai ideologi/paham Komunis. Terkait isu ini, masyarakat Indonesia mengenang bangsa dan negara Tiongkok tentang pemberontakan. Bayangan Partai Komunis yang melakukan kudeta membuat hubungan Indonesia dan Tiongkok memburuk dan membekukan hubungan bilateral. Warisan dari percobaan kudeta pada tahun 1965 yang sepertinya tidak akan hilang dalam waktu dekat. Peristiwa itu – yang banyak menyalahkan Partai Komunis Indonesia, diduga kuat didukung oleh Partai Komunis China - memicu perburuan

para pendukung komunis di Indonesia yang menewaskan sekitar 500.000 orang pada tahun 1965-66. Semua ini sering diungkap sebagai materi yang menghambat hubungan antar masyarakat kedua negara. Gambaran sejarah ini masih melekat dalam ingatan atau pikiran masyarakat Indonesia (Yuniarto, 2020) Ekse dari persoalan ini meluas pada prasangka atau menjadi gerakan anti-Tiongkok. Sentimen anti-Tiongkok/Tionghoa masih bercokol di sebagian masyarakat Indonesia dan menjadi perhatian utama ketika menyoal hubungan tentang Tiongkok.

Persepsi negatif orang Indonesia tentang bangsa Tiongkok juga diwarnai dengan adanya sentimen masyarakat Indonesia terkait diaspora etnis Tionghoa (Laksana, 2011). Ini adalah mengenai kelompok orang Tionghoa Indonesia yang dekat dengan kelompok pemerintah di era pemerintahan Presiden Suharto. Peran sekelompok kecil orang Indonesia kaya yang beretnis Tionghoa terkait dengan upaya bisnis dengan mendapatkan rekomendasi dari Suharto, hingga kini juga menjadi preseden buruk yang mempengaruhi cara pandang hubungan antara Indonesia-Tiongkok. Pada era orde baru, Presiden Suharto memiliki hubungan dekat dengan orang-orang Indonesia-Tionghoa yang memiliki beragam keistimewaan dalam jaringan bisnisnya. Kebanyakan dari mereka

ini berasal dari Tiongkok Selatan di mana kakek buyut mereka menjadi cikal bakal perantauan Indonesia-Tionghoa di Indonesia (Tjin, 2012). Kondisi ini memperlihatkan fenomena atau masalah pribumi dan non-pribumi muncul dikalangan masyarakat.

Saat Presiden Abdurrahman Wahid mencabut larangan 32 tahun terhadap penggunaan simbol, aksara, dan budaya Tiongkok di Indonesia berdampak pada keterbukaan—secara administratif—terhadap budaya Tiongkok. Pembelajaran Bahasa Mandarin mulai diajarkan secara luas di sekolah-sekolah Indonesia. Pada tahun 2007 Pusat Bahasa Mandarin (PBM) dibuka di Indonesia bekerja sama dengan beberapa universitas di Indonesia. Perayaan budaya seperti tahun baru dan festival-festival mulai boleh dirayakan. Namun demikian, secara sosial hal ini tidak membawa pemahaman dan penerimaan yang lebih baik tentang budaya Tiongkok itu sendiri (termasuk penerimaan terhadap orang Tiongkok) dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Bila dipersingkat, penerimaan soal bahasa dan perayaan hanya mempermudah kegiatan ekonomi Tiongkok untuk memasarkan produknya di Indonesia. Produk-produk “*made in China*” seperti Xiaomi, Huawei dan JD telah diterima dengan baik di Indonesia. Ditambah lagi 16 perguruan tinggi yang memiliki sub jurusan bahasa dan budaya Indonesia berada di Tiongkok Selatan, dan pergu-

ruan tinggi Tiongkok Selatan dikenal sebagai “tempat lahir para diplomat”. Namun dalam persepsi sosial dan gambaran terhadap (migran) Tiongkok sendiri tidak banyak berubah.

Sampai di Indonesia migran Tiongkok cenderung masih berpegang pada budaya dan kebiasaan negara mereka. Dalam hubungan sosial lebih inklusif terlibat dengan sesama imigran asal Tiongkok daripada bergabung dengan jejaring sosial penduduk setempat. Hal ini bisa dipahami karena selain keterbatasan bahasa atau minimnya teman juga karena kedatangan migran baru Tiongkok ini relatif baru datang ke Indonesia dan tidak berafiliasi dengan kelompok migran sebelumnya. Seperti sudah dikatakan sebelumnya migran datang ke Indonesia memiliki kesamaan jenis pekerjaan, misalnya sebagai pedagang atau sebagai karyawan pabrik mengikuti proyek negara atau bisnis perusahaan yang didirikan di Indonesia. Oleh karena itu mereka membentuk kelompok berdasarkan hubungan kerja.

Migran Tiongkok di Indonesia dalam hubungan sosial tampak bersi-

fat eksklusif. Kerjasama dilakukan dengan mitra lokal Indonesia (misalnya partner kerjasama, kekasih atau pasangan) atau dukungan dari jaringan teman dan anggota keluarga di negara asal yang memiliki koneksi (jaringan sosial). Bagi migran yang bekerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) milik Tiongkok umumnya bersosialisasi dengan kelompok pejabat dari negara Tiongkok atau teman pejabat dari Indonesia. Namun tujuannya lebih untuk mempermudah kontrak, mendapatkan konsesi, atau menjadi bagian dari proyek yang dikerjakan. Sedangkan bagi mereka yang bekerja di usaha perdagangan kecil dan menengah (seperti digital marketing dan retail) dari segi pekerjaan lebih informal, melakukan satu dan dua pekerjaan dalam waktu yang bersamaan, misalnya menjadi pedagang dibarengi dengan pekerjaan sampingan sebagai guru atau menjadi murid kelas bahasa atau mahasiswa universitas. Mereka ini cukup banyak bersosialisasi dengan orang Indonesia sekaligus dengan warga Tiongkok lainnya.¹⁰

¹⁰ Migran Tiongkok yang bekerja sebagai pedagang, biasanya memiliki toko atau kantor kecil di suatu kota (misalnya Jakarta, Bandung, Bali, Surabaya, Makasar). Biasanya toko atau kantor mereka ada di pusat perbelanjaan yang memungkinkan dilakukannya transaksi intensif dengan konsumen. Beberapa hanya memiliki ruang 15-30 meter persegi. Seperti yang diamati oleh Ping Lin (2020) digambarkan usaha yang dijalankan kebanyakan lebih dari separuh aksesoris elektronik atau mesin cetak untuk usaha tekstil, kertas, dan lain sebagainya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan barang-barang tersebut didatangkan (ada yang dikirim secara ilegal dengan menyuap petugas bea cukai) dari Tiongkok daratan. Terkadang pemilik toko hanya mengimpor barang yang tersedia dari situs e-commerce (seperti taobao.com dan tencent.com) yang berbahasa Mandarin, kemudian menjualnya ke pembeli Indonesia dengan harga tiga hingga lima kali lipat dari harga aslinya.

Maladaptasi

Terdapat beberapa keuntungan menjadi orang asing di Indonesia. Hal pertama yang paling mudah dikenali adalah faktor ekonomi: orang asing dianggap memiliki kekuatan ekonomi yang lebih besar dibandingkan dengan kebanyakan warga Indonesia. Selain itu dibayangkan mereka memiliki gaya hidup (pergaulan dan konsumsi) yang seringkali lebih materialistis atau hedonis. Hal lainnya yang muncul dari apa yang dianggap sebagai keunggulan dari keanehan fisik yang dimiliki, seringkali disebut sebagai 'eksotik' warna kulit. Terjadinya 'perbedaan sosial' ini adalah akibat akumulasi dari sekumpulan gambaran yang lebih kompleks yang dibayangkan dan dimainkan dalam pergaulan sosial antara asing (pendatang) dengan karakteristik budaya dan fisik orang lokal. Aspek penting yang membentuk perbedaan sosial migran Tiongkok ini adalah gagasan kulit 'kuning' atau kulit 'putih', yang hampir sama diberikan kepada bangsa lain yang berbeda dengan kebanyakan warga lokal yang berkulit 'kecoklatan', warna kulit, gambaran kelebihan finansial, dan gaya hidup, sampai batas tertentu (misalnya untuk kehidupan warga di desa) masih dianggap lebih tinggi (atau unggul) daripada orang Indonesia.

Menurut Fechter (2000) ide mengenai superioritas orang asing ini tampaknya didasarkan pada beberapa keuntun-

gan orang asing, yaitu: kekuatan politik dan ekonomi yang lebih besar; karena mereka tergolong negara industri maju dengan pemahaman dan penggunaan 'teknologi tinggi' dalam kehidupan; memiliki standar pendidikan cukup tinggi (paling tidak merasakan jenjang universitas); standar kenyamanan hidup tinggi; budaya hidup sehari-hari yang ditandai dengan efektivitas waktu, penuh kerja keras, dan meraih kesuksesan hasil. Hal-hal ini seringkali menjadi dasar kekaguman terhadap orang asing, yang lantas memberi mereka status (*prestige*) tertentu, mendapat banyak perhatian dari publik, yang terbawa dan menempel dalam jubah kehidupan mereka sehari-hari.

Namun realitas di lapangan tidaklah selalu sesuai dengan teori di atas, ada kondisi negatif sebagai orang asing yang juga dianggap inferior dalam kehidupan sebagai warga asing. Tidak selalu bahwa orang asing memiliki kelebihan ekonomi. Migran baru Tiongkok adalah orang kelas menengah atau bawah dari daerah pedesaan di Tiongkok daratan. Dengan pengetahuan dan modal yang terbatas, sulit bagi mereka untuk mencapai kehidupan yang stabil dan sejahtera di kota-kota besar. Sebagian besar migran Tiongkok ke Indonesia memperoleh peluang karir yang lebih menjanjikan, bisa mencapai status sosial ekonomi yang lebih tinggi, dan menikmati kehidupan yang nyaman. Misal-

nya, mereka yang berasal dari Tiongkok pesisir bisa menjadi manajer perusahaan besar; namun mereka yang berasal dari daerah pedalaman cenderung menjadi pedagang kecil, wiraswasta, tenaga kerja migran, atau dipekerjakan sebagai staf lokal saja (Lin, 2020).

Selain itu, mereka kurang memiliki kompetensi sosial dan budaya lokal (memahami budaya suku dimana mereka tinggal), dianggap rendah kesadaran dan praktik spiritual atau moralitas; mereka kurang menahan diri dalam hal emosi serta dianggap tidak memahami asas-asas kesopanan lingkungan pergaulan. Orang asing kadang-kadang dianggap sebagai ‘pendatang dari planet lain/*alien*’, yang berperilaku dan bersikap tidak pantas dan diharapkan untuk lebih belajar mengetahui budaya lokal lebih baik. Kontradiksi semacam ini menunjukkan sikap terhadap pendatang baru termasuk migran dari Tiongkok di kalangan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Sebagai contoh, laporan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Provinsi Banten tentang perilaku pekerja asal Tiongkok yang bekerja di proyek konstruksi pabrik semen (nama perusahaan dihilangkan) membuat warga sekitar resah. Mereka dilaporkan kerap berperilaku tidak sopan dan memiliki kebiasaan sanitasi yang buruk—beberapa pekerja yang dilaporkan merebahkan warga karena buang air besar

tidak pada tempat semestinya. Ketua LSM Banten mengatakan perilaku pekerja Tiongkok itu kemungkinan di negara asalnya tidak memiliki pendidikan yang baik. Sebab perilaku buruk dengan buang air besar di sembarangan tempat itu tentu tidak mengetahui kesehatan dan kebersihan. Lokasi pembangunan pabrik semen itu kondisinya hutan dan tepi pantai sehingga mereka dengan seenaknya buang air besar di sembarangan tempat. Kepala Bidang Pembinaan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Disnakersos) Kabupaten Lebak mengatakan, saat ini jumlah warga Tiongkok yang bekerja di pabrik semen di Kecamatan Bayah tercatat 799 orang (Newswire - Bisnis.com, 26 Juni 2015).

Baik ‘superioritas’ maupun ‘inferioritas’, berada dalam ruang dan waktu yang sama termasuk dalam berbagai wacana sosial-politik di media. Berdasarkan gambaran kehidupan orang asing (pekerja migran) ini, tampaknya kehidupan para migran baru dari Tiongkok dapat diungkap dalam metafora ‘hidup dalam kesenjangan’ (meminjam terminologi dari Anne-Meike Fechter, 2000). Seorang atau sekelompok migran hidup dalam kesenjangan, baik secara geografis dan sosial: mereka datang-pergi, bolak-balik antar negara, tetapi tidak sepenuhnya menjadi bagian dari satu atau masyarakat lain, atau mungkin juga tidak menjadi bagian

warga di daerah asalnya. Atau dengan kata lain, dapat kita gambarkan model kehidupan migran di Indonesia tersebut sebagai 'ruang hidup ketiga', yang bukan sepenuhnya merupakan negara asal di Tiongkok maupun Indonesia, tetapi merupakan situasi kehidupan khusus sebagai orang asing.

Ruang ketiga atau 'Celah' dalam kehidupan migran ini secara terus menerus diciptakan dan digambarkan kembali terhadap para pendatang baik yang berasal dari Barat (biasa orang Indonesia menyebut dengan istilah *Bule*) maupun dari Tiongkok. Hidup dalam wilayah tersendiri dimungkinkan terjadi karena perbedaan antara orang Tiongkok (pendatang) dan Indonesia (orang asli). Ruang ketiga adalah ruang yang tertutup karena perbedaan tersebut, dan tidak menyediakan mereka bersatu dengan habitat lokal karena identitas yang menempel pada dirinya. Oleh karena hidup dalam ruang ketiga berbeda dengan habitat lokal lantas mempengaruhi bagaimana mereka berhubungan dengan Indonesia dan masyarakatnya. Hal ini terlihat bagaimana mereka membangun relasi dengan sesama mereka dan bagaimana hal itu pada gilirannya menghasilkan serangkaian pola afiliasi yang eksklusif.

(Perjuangan) Asimilasi *Xinyimin*

Karena kuatnya kesukuan, nasionalisme dan kebijakan proteksio-

nis dalam mendukung kesejahteraan ekonomi "orang (asli) Indonesia" yang (masih banyak) hidup di bawah garis kemiskinan, migrasi—internal maupun internasional—kerap memunculkan kecurigaan dan prasangka buruk terhadap para pendatang (orang asing). Apalagi terhadap migran Tiongkok yang jumlahnya sekarang terbesar sebagai migran pendatang di Indonesia. Sejak dahulu dari jaman kolonial hingga sekarang, hubungan kompleks pada kelompok migran ini telah digambarkan oleh para antropolog (seperti Furnival) atau ahli migrasi (seperti Tirtosudarmo) tentang konsep masyarakat majemuk, yaitu "masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih unsur atau tatanan sosial yang hidup berdampingan, namun tanpa bercampur, dalam satu kesatuan politik" (Effendi, 2005). Salah satu hal penting proses migrasi di masyarakat majemuk Indonesia adalah relasi sosial yang didasarkan antara kategori demografis penduduk asli dan pendatang baru, seperti hubungan berbasis etnis dan ekonomi (termasuk agama juga didalamnya).

Dalam konteks migrasi dari Tiongkok saat ini di mana globalisasi dan investasi sebagai penggerak utama perubahan, kemajemukan membutuhkan pemahaman kembali tentang bagaimana bekerja. Menurut Effendi (2005), ada faktor-faktor yang muncul yang mengubah gambaran pluralitas Indonesia dalam

konteks dunia global. Di satu sisi, pluralitas berbasis etnis atau agama tidak lagi cukup menjadi elemen utama kontennya. Di sisi lain, ketimpangan ekonomi, perkembangan pendidikan, dan ketimpangan kemakmuran menjadi beberapa faktor yang mengisi fakta kemajemukan. Dengan kata lain, meski relasi antar etnis nampaknya telah menjadi basis sosial di kalangan masyarakat Indonesia, namun gambaran kemajemukan menjadi bercampur, bahkan, terjalin di antara banyak faktor. Permasalahan sosial yang muncul di masyarakat menunjukkan kemajemukannya masyarakat Indonesia sebenarnya. Masalah sosial migran pendatang seperti yang diuraikan di atas bersanding dengan masalah nasional dari soal integrasi hingga konflik antar etnis, dari agama tradisional hingga kehidupan sekuler, dan dari kepentingan ekonomi nasional/internasional hingga kepentingan ekonomi warga/etnis lokal.

Migrasi warga Tiongkok di Indonesia sangat terkait dalam upaya pencarian pekerjaan, mendapatkan peluang bisnis, upaya peningkatan pendidikan, menjalin pernikahan dan ada juga yang berupaya melakukan reunifikasi (penyatuan kembali keluarga). Proses

migrasi ini tentu saja membawa konsekuensi sosial-ekonomi seperti isu liberalisasi tenaga kerja, upaya menciptakan eksposur budaya dan hubungan antar manusia lainnya yang berbeda-beda antar kelompok. Namun demikian, prasangka buruk tetap berlaku terhadap para migran baru Tiongkok. Masih terdapat kesenjangan yang sangat besar dalam hal “ketidaksukaan” terhadap migran Tiongkok di benak orang Indonesia. Bukan hanya soal perbedaan ideologi politik, ras, agama, dan etnis, juga soal ‘perilaku sehari-hari’ yang ditimbulkan oleh mereka. Hal ini menjadi kendala perjuangan asimilasi migran pendatang asal Tiongkok. Kehadiran di masyarakat kerap menimbulkan ketegangan antara keberadaan pendatang (pekerja) Tiongkok dengan penduduk lokal.¹¹

Masuknya tenaga kerja migran Tiongkok, khususnya dibidang infrastruktur dan manufaktur, di Indonesia secara serius dianggap merugikan banyak pekerja lokal Indonesia termasuk pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri (Malaysia, Taiwan, Arab Saudi, dan lain-lain). Pasalnya, Indonesia masih menghadapi tingkat pengangguran di tengah terbatasnya lapangan

¹¹ Beberapa cerita kasus bisa diajukan, antara lain: 1) hadirnya migran Tiongkok dibarengi dengan dokumen yang tidak semestinya, melakukan entri ilegal, terlibat tindakan kriminal, dan memegang jenis visa yang salah; 2) masuknya pendatang baru Tionghoa menyebabkan pergantian pekerjaan terutama pekerjaan yang berhubungan dengan pengajaran bahasa Mandarin; 3) pedagang pengecer lokal berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan dalam bersaing dengan pedagang langsung dari Tiongkok—ditambah tidak berizin usaha. Sebagai akibat menyebabkan konflik antara pendatang Tiongkok dan warga lokal.

kerja yang disediakan oleh pemerintah Indonesia bahkan di sektor pekerja kasar (*3D, dirty, dangerous, difficult*) sekalipun. Padahal, pekerja yang dikategorikan sama-sama 'tidak terampil' asal Tiongkok ini dibayar lebih tinggi dibandingkan pekerja lokal Indonesia (Maksum & Sahide, 2019).¹²

Bandingkan persoalan ini dengan tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri dengan berhutang bahkan dengan resiko buruk yang kemungkinan akan dihadapi di negara tujuan. Sementara pekerja Tiongkok justru melenggang dengan leluasa bekerja di Indonesia. Secara ekonomi, kehadiran pekerja pendatang jelas dianggap merugikan bahkan menjadi ancaman bagi pasar tenaga kerja domestik. Seperti pandangan neo-merkantilis yang memandang bahwa interdependensi antarnegara tidak selalu simetris (Balaam dan Veseth, 2001). Arus bebas tenaga kerja membuat khawatir sebagian masyarakat karena akan membuat pasar tenaga kerja domestik, khususnya Indonesia, akan dibanjiri dan bergantung terhadap suplai tenaga kerja asing. Maka kebijakan untuk mendapatkan investasi dari luar dibarengi dengan masuknya tenaga kerja asing (liberalisa-

si pasar tenaga kerja) bisa jadi ancaman bagi pasar tenaga kerja domestik. Berdasarkan pandangan ini, posisi migran Tiongkok di Indonesia adalah kelompok pendatang yang menjadi saingan sekaligus ancaman bagi tenaga kerja lokal.

Kehadiran migran asal Tiongkok telah menambah 'ruwet' kehidupan sosial di masyarakat. Peningkatan kasus kriminal yakni kasus perdagangan narkoba dan prostitusi warga negara Tiongkok menduduki peringkat kedua setelah Nigeria (15 kasus) dengan 8 kasus di tahun 2015. Sementara itu, selama tahun 2016, Dirjen Imigrasi melakukan penindakan proses dengan Pro Justisia yakni China (Tiongkok) 126, Nigeria 134, Banglades 27, India 19, Indonesia 18, Thailand 17, Maroko 11, Korea Selatan 11, Malaysia 10, Myanmar 9. Pemerintah mengambil langkah tegas terhadap warga negara asal Tiongkok dan Taiwan yang berhasil ditangkap oleh Tim Satgas Polri dan Kepolisian Tiongkok di tiga lokasi berbeda, yakni Bali, Surabaya dan Jakarta (Setyawan, 2017). Para migran Tiongkok yang menyalahgunakan visa turis menjadi kegiatan kriminal ditangkap karena kejahatan siber selanjutnya dideportasi. Contoh diatas menunjukkan adanya pola pelanggaran

¹² Sebagai contoh, di Mojokerto, Jawa Timur, misalnya, para pekerja migran Tiongkok menerima sekitar Rp 6 juta (USD 420) atau hampir dua kali lipat dibandingkan dengan pekerja lokal. Gaji tenaga kerja lokal yang menurut ketentuan gaji minimum daerah (UMR, Upah Minimum Kabupaten) No. 78/2015 jumlahnya sekitar Rp 3 juta sebulan. Mereka juga tidak bisa berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia. Situasi berbeda dengan aturan ketenagakerjaan, menurut Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016, TKI harus bisa berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia.

yang dilakukan oleh migran asal Tiongkok sehingga mereka indentikal sebagai ‘kriminal’.

Di kelompok pedagang, selain dianggap ancaman juga disematkan istilah ‘pelangar visa’, yaitu visa tinggal digunakan untuk usaha yang tidak memiliki izin dengan pemerintah setempat. Kasus yang terjadi di Pulau Bali adalah salah satu contoh. Pada November 2018 Gubernur Bali menginstruksikan menutup 16 toko, *art shop*, dan unit usaha milik orang Tiongkok yang memiliki izin pertokoan namun menjalankan usaha bidang pariwisata *tour and travel* sekaligus membawa produk dari Bali untuk dijual ke Tiongkok tanpa melalui bea cukai. Kondisi ini merusak citra pariwisata di Bali secara keseluruhan kepada penduduk (pengusaha) lokal dan para wisatawan yang datang. Pemerintah Bali melakukan pencegahan untuk menghindari citra buruk pariwisata daerah, dan pelanggar harus ditindak secara tegas (bali.inews.id, 2018). Kehadiran migran Tiongkok disektor perdagangan dan pariwisata tidak memberikan efek positif bagi masyarakat. Investasi, bisnis, dan kewirausahaan migran baru Tiongkok justru tidak membawa peluang kerja dan pendapatan bagi penduduk lokal. Peran ekonomi dari para migran baru Tiongkok juga tidak memupuk hubungan antara komunitas dan pembangunan ekonomi lokal dengan membawa teknologi dan perubah-

an material pedagang lokal. Yang terjadi justru Tiongkok merusak kompetisi bisnis di bidang pariwisata di Bali dan tidak terjadi saling bantu perdagangan (bali.inews.id, 2018).

Migran asal Tiongkok semakin menambah panjang perjuangan asimilasi etnis Tionghoa, baik yang lama maupun yang baru, di Indonesia. Dalam hubungan sosial warga bangsa Indonesia dengan etnis Tionghoa, masih ada terjadi psikososial-diskriminatif dan rasisme. Sikap diskriminatif yang terjadi sejak masa kolonial hingga sekarang yang mengungkung etnis Tionghoa dalam menjalankan berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, budaya, religi, politik maupun pendidikan terus akan berlanjut dengan perilaku yang ditampilkan migran baru Tiongkok ini. Kehadiran mereka tampaknya hanya sebatas pejuang ekonomi di negara asing dengan segala problematikanya. Namun dalam praktik hidup bersama, ketimbang membangun ‘*productive assimilation*’ menuju hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan justru terjebak masuk pada persoalan ‘*Tiongkok si Aseng*’ sebagai sebuah produk globalisasi yang menjadi gangguan dan ancaman. Stigma bahwa orang Tionghoa itu eksklusif dan tertutup hidup dan bergaul dengan lingkungan komunitasnya sendiri berlanjut pada kelompok migran baru Tiongkok.

Dengan kedatangan *xinyimin*, Indonesia mungkin akan mengalami situasi totok dan peranakan lagi. Para pendatang baru Tiongkok (totok) ini mungkin berkonflik dengan orang Indonesia Tionghoa (peranakan) yang juga menganggap pendatang baru sebagai pesaing dan ancaman. Hubungan antara *xinyimin* dan orang Indonesia Tionghoa yang tidak berbahasa Mandarin belum terjalin baik. Gambaran *xinyimin* terlihat sombong dan meremehkan orang Indonesia Tionghoa setempat, sebaliknya orang Indonesia Tionghoa sering tidak mempercayai pengusaha *xinyimin*. Perusahaan *xinyimin* besar lebih banyak berkolaborasi dengan pengusaha lokal yang fasih berbahasa Mandarin. Oleh karenanya kontak dengan orang lokal sangat membantu *xinyimin* untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Hal ini terutama terjadi di luar Jawa di mana banyak orang Indonesia Tionghoa masih bisa berbahasa Mandarin. Selain itu, muncul ketegangan — dan konflik — antara *xinyimin* dan penduduk asli, yang melihat mereka sebagai pengeksploitasi sumber daya (Suryadinata, 2020).

Kesimpulan

Xinyimin di Indonesia terlibat dalam pencarian pekerjaan, peluang bisnis, peningkatan pendidikan, dan pernikahan. Proses internalisasi dengan masyarakat selain mendorong pertukaran

sosial-budaya juga menciptakan konflik. Biasanya, pekerja lokal dibayar sekitar belasan dollar per hari, sementara pekerja Tiongkok dapat memperoleh beberapa ratus dolar per bulan. Hal ini memicu rasa ketidakpuasan pekerja lokal yang merasa iri dengan gaji tinggi pekerja Tiongkok, sementara mereka harus berjuang keras untuk mendapatkan upah yang layak, tanpa memandang kebangsaan. Keberadaan *xinyimin* di Indonesia dianggap sebagai pesaing dan sebagai pihak yang mengeksploitasi sumberdaya alam. Akibatnya pandangan negatif terus muncul terhadap *xinyimin* dan menjadi salah satu hambatan dalam interaksi dan akulturasi mereka di Indonesia.

Sebagai saran, selain perlu memiliki tingkat kepercayaan dan empati budaya yang tinggi, setiap *xinyimin* dalam perusahaan maupun masyarakat harus memiliki kesadaran budaya masyarakat lokal. Kesadaran tersebut harus berkembang secara alami atau terlatih sehingga dapat mendukung kelancaran interaksi komunikasi di dalam perusahaan dan masyarakat. Perusahaan dan pemimpin juga perlu memahami bahwa perbedaan budaya memiliki pengaruh langsung terhadap keberlanjutan perusahaan, sehingga peran budaya organisasi menjadi sangat penting. Budaya perusahaan terbentuk dari interaksi yang berkelanjutan antara individu dalam perusahaan, baik secara formal

maupun non-formal. Dengan demikian, perusahaan perlu mengimplementasikan interaksi budaya untuk mengatasi perbedaan. Langkah-langkah ini akan

memastikan keberlanjutan hubungan antar manusia tetap terjaga (Li, 2017; Thjin, 2012; Yuniarto, 2020).

Referensi

- Asiati, D et al 2017, *Tenaga Kerja Asing (TKA) Ilegal Di Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penyelesaian*, Kertas Kebijakan Kedeputan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (IPSK-LIPI), Tidak diterbitkan.
- Bali.inews.id 2018, 16 Toko China Rusak Citra Wisata Bali, Gubernur Instruksikan Ditutup. *Bali.inews.id*, 16 November, dilihat 12 Februari 2024, (<https://bali.inews.id/berita/16-toko-china-rusak-citra-wisata-bali-gubernur-instruksikan-ditutup>).
- Balaam, DN & Veseth, M 2005, *Introduction to International Political Economy* (3rd ed.), Prentice Hall, New Jersey.
- Balitbang Hukum dan HAM 2017, *Eksistensi Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Dalam Perspektif Keimigrasian*, Balitbang Hukum dan HAM, Imigrasi, Jakarta.
- Cantle, T 2013, Interculturalism as a new narrative for the era of globalization and super-diversity, in Barrett, M. (ed.), *Interculturalism and multiculturalism: similarities and differences*, Council of Europe, Strasbourg, pp. 1-19.
- Chang, LC 2011, 'The negotiation styles of overseas Chinese: A comparison of Taiwanese and Indonesian Chinese patterns', *African Journal of Business Management*, Vol. 5, No. 20, pp. 8079-8087, (<https://doi.org/10.5897/AJBM10.1282>).
- Dai, G & Cai, Y 2017, 'The Cross-Culture Management of Chinese Enterprises in Poland under the Belt and Road Initiative – Based on PEST Model', *International Business Research*, Vol. 10, No. 9, pp. 1-10.
- Der Eng, PV 2018, Mempertanyakan Jumlah Perusahaan China di Indonesia, *CNBC Indonesia*, 12 Desember, dilihat 12

- Maret 2024, (<https://www.cnbcindonesia.com/opini/20181212183937-1446117/mempertanyakan-jumlah-perusahaan-china-di-indonesia>).
- Effendi, N 2005, 'A contested cultural identity among migrants in three Sumatran cities of Indonesia: Ethnic entrepreneurs between global economy and ethnic identity', Paper presented at 4th International Symposium of the Journal Antropologi Indonesia, *Indonesia in the Changing Global Context: Building Cooperation and Partnership?*, University of Indonesia, 12-15 July.
- Douglas, M 1998, Contemporary Theories of Migration, in: Massey, D. (ed.), *Worlds in Motion: Understanding International Migration at the End of Millennium*, UK: Oxford University Press, Oxford, pp. 17-59.
- Maksum, A & Sahide, A 2019, 'The Chinese Migrant Workers in Indonesia: The Local and Migrant Workers Context', *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, Vol. 7, No. 3, pp. 511-531, (<https://doi.org/10.26811/peuradeun.v7i3.348>).
- Mohan, GLB & Tan-Mullins, M 2014, *Chinese Migrants and Africa's Development: New Imperialists or Agents of Change*, Zed Books, London.
- Fechter, A-M 2000, 'Living in the gap: foreigners in Yogyakarta, Java', *Intergraph, Journal of Dialogic Anthropology*, Vol. 2, No. 1, dilihat 26 Februari 2024, (<http://www.intergraphjournal.com>).
- Gong, X 2018, Why some in South-east Asia still have reservations about China's Belt and Road Initiative, *Today*, 20 March, dilihat 25 Februari 2024, (<https://www.todayonline.com/commentary/why-some-south-east-asia-still-have-reservations-about-chinas-belt-and-road-initiative>).
- Hall, ET & Hall, MR 1990, *Understanding Cultural Differences*, Intercultural, Yarmouth, Maine.
- Kanak, D 2016, China's Belt and Road initiative vital to Asian job creation, *Asian Nikkei*, 28 December, dilihat 12 Februari 2024, (<https://asia.nikkei.com/Viewpoints/Don-Kanak/China-s-Belt-and-Road-initiative-vital-to-Asian-job-creation>).
- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenuaker) 2019, *Perbandingan*

- Jumlah Tenaga Kerja Asing di Indonesia dengan Negara Lainnya*, Kemenaker, dilihat 21 Maret 2024, (<https://tk-online.kemnaker.go.id/>).
- Laksana, EA 2011, 'Variations on a theme: Dimensions of ambivalence in Indonesia-China relations', *Harvard Asia Quarterly*, Vol. 12, No. 1, pp. 24-31.
- Li, W 2017, Construction of Humanistic Silk Road with Sharing Cultures and Intercommunicating Souls Based on Chinese Civilization Wisdom, *IOSR Journal of Research & Method in Education (IOSR-JRME)*, Vol. 7, No. 2, pp. 01-05.
- Liem TK 1992, *Baba dan Nyonya: The Chinese of Singapore and Melaka*, Oxford University Press, Singapore.
- Lin, P 2016, 'Being Privileged Overseas: Taiwanese People in Jakarta', *Translocal Chinese: East Asian Perspectives*, Vol. 10, No. 2, pp. 201-231, (<https://doi.org/10.1163/24522015-01002003>).
- Lin, P 2020, 'Discovering the Xinyimin in Jakarta: New Chinese Migrants from the PRC', *Translocal Chinese: East Asian Perspectives*, Vol. 14, No.1, pp.66-94, (<https://doi.org/10.1163/24522015-01401005>).
- Mei, L 2010, 'Chinese Migrant Workers in Singapore: An Analysis Based on Interviews', *International Journal of China Studies*, Vol. 1, No. 1, pp. 194-215.
- Muttarak, R 2017, 'Moving along the Belt and Road: Implications of China's "One Belt, One Road" Strategies on Chinese Migration', *Translocal Chinese: East Asian Perspectives*, Vol. 11, No. 2, pp. 312-332.
- Newswire - Bisnis.com, 2015, Waduh, Para Pekerja asal China di Lebak Suka BAB Sembarang, *Bisnis.com*, 26 June, dilihat 12 Februari 2024, (<https://ekonomi.bisnis.com/read/20150626/12/447727/waduh-para-pekerja-asal-china-di-lebak-suka-bab-sembarang>).
- Nukitragansan, K 2019, The New Chinese Migrants in Thailand. *Mobilities, Roles, And Influence of SinoThai Relations*, dilihat 10 Februari 2024, (<http://www.vijai-china.com/sites/default/files/6.2%20Kulnaree%20Nukitragansan.pdf>).
- Octavia, S & Badaruddin, M 2017, 'Turnkey Project Dan Dinamika Pengaturan Ketenaga-

- kerjaan Asing Di Indonesia', *Jurnal Asia Pacific Studies*, Vol. 1, No. 2, (ejournal.uki.ac.id/index.php/japs/article/view/617).
- Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- Setyawan, F.A 2017, Yasonna Segera Deportasi Ratusan WNA China Pelaku Cyber Crime, *CNNIndonesia*, 31 July, dilihat 6 Maret 2024, (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170731125612-12-231427/yasonna-segeradeportasi-ratusan-wna-china-pelaku-cyber-crime/>).
- Siriphon, A 2015, Xinyimin, New Chinese Migrants, and the Influence of the PRC and Taiwan on the Northern Thai Border, in: Santasombat, Y. (ed.), *Impact of China's Rise on the Mekong Region*, Palgrave Macmillan, New York, pp. 1-19, (https://doi.org/10.1057/9781137476227_6).
- Suryadinata, L 2020, 'New Chinese Migrants in Indonesia: An Emerging Community that Faces New Challenges', *Perspectives, Issues and Prospects, Trends in Southeast Asia*, Vol. 61, Issue 2020, pp. 1-10.
- Tjhin, C 2012, 'Indonesia's relations with China: Productive and pragmatic, but not yet a strategic partner', *China Report*, Vol. 48, No. 3, pp. 303-315, (<https://doi.org/10.1177/0009445512462303>).
- Yuniarto, PR 2020, 'Opportunities and Challenges of Socio-Cultural Cooperation in China's Belt and Road Initiative in Indonesia', *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 9, No. 2, pp. 395-416, (<https://doi.org/10.18196/hi.v9i28232>).